VISI DAN MISI

CALON PRESIDEN & CALON WAKIL PRESIDEN

GANJAR PRANOWO & MAHFUD MD

2024-2029



MENUJU INDONESIA UNGGUL

GERAK CEPAT MEWUJUDKAN NEGARA MARITIM
YANG ADIL DAN LESTARI

MENUJU INDONESIA UNGGUL

Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPRIBADIAN

MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH

MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL

MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU

MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL

MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

KETERSEDIAAN ANGGARAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

DIGITALISASI BIROKRASI

Daftar Isi

DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 7
PERSOALAN POKOK DAN TANTANGAN KE DEPAN 8
VISI 11
MISI 13
1. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPRIBADIAN 15

1.1. Kesehatan Jiwa dan Raga 18
1.1.1. 1 Desa – 1 Puskesmas/Pustu – 1 Dokter/Nakes 18
1.1.2. Layanan Konsul Keliling (KOLING) 18
1.1.3. Ibu Sehat, Anak Sehat 18
1.1.4. Penguatan Kesehatan Mental 18
1.1.5. Perluasan & Kemudahan Layanan Kesehatan 18

1.2. Pendidikan Berkualitas dan Merata 18
1.2.1. Wajib Belajar 12 Tahun Gratis: Pintar Tanpa Biaya 18
1.2.2. 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana 19
1.2.3. Guru dan Dosen Sejahtera, Berkualitas, dan Kompeten Sejajar Negara Maju 19
1.2.4. Integrasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi – Dunia Usaha 19

1.3. Negara Hadir dan Perlindungan Sosial Adaptif 20
1.3.1. Tingkat Kemiskinan 2,5% dan Kemiskinan Ekstrem 0% 20
1.3.2. PKH 15 Juta Keluarga Penerima Manfaat 20
1.3.3. Cukup Pakai NIK 20
1.3.4. Penguatan Sistem SATU DATA INDONESIA 20
1.3.5. Dana Abadi Kesejahteraan Sosial 20

1.4. Budaya Maju dan Sportif 20
1.4.1. Berkepribadian Nasional 20
1.4.2. Seni Budaya Indonesia Kebanggaan Dunia 21
1.4.3. Seniman Aman Nyaman 21
1.4.4. Budayawan Berkarya 21
1.4.5. Atlet Sejahtera Prestasi Mendunia 21
1.4.6. 1 Desa – 1 Lapangan 21

1.5. Perempuan Maju dan Anak Sejahtera 21
1.5.1. Kartini Maju 21
1.5.2 Jaga Teman 21
1.5.3. Memperbanyak Tempat Penitipan Anak 22

2. MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI 23

2.1. Riset dan Inovasi Sebagai Fondasi 26
2.1.1. Lipat Gandakan Anggaran Riset dan Inovasi 26
2.1.2. Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi 26

2.2. Lompatan Menjemput Kemajuan 26
2.2.1. GP *Project* 26
2.2.2. Beasiswa yang Masif dan Terarah 26

3. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH 27

3.1. Ekonomi Unggul Berdaya Saing 30
3.1.1. Cepat Kerja – 17 Juta Lapangan Kerja Baru 30
3.1.2. Mudah Berusaha 30
3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Mencapai 7% 30
3.1.4. Percepatan Penyelesaian IKN 30
3.1.5. *Made in* Indonesia 30
3.1.6. Industrialisasi 5.0: Karena Semua Ada di Kita 31
3.1.7. Ekonomi Kreatif Makin Melaju 31
3.1.8. Indonesia Tujuan Utama Pariwisata Dunia 31
3.1.9. Fiskal Tangguh 31
3.1.10. Infrastruktur dan Simpul Konektivitas Indonesia 31
3.1.11. Logistik Murah 31
3.1.12. BUMN Unggul 31

3.2. Kedaulatan Pangan 32
3.2.1. Pangan Terjamin, Terjaga, Terjangkau, dan Terdiversifikasi 32
3.2.2. Alsintan Modern dan Dukungan Sarana Prasarana 32
3.2.3. Industri Pangan Berkelanjutan 32
3.2.4. Lahan Subur untuk Petani 32
3.2.5. Petani, Peternak, dan Nelayan Sejahtera 32

3.3. Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal 32
3.3.1. Pusat Industri Keuangan Syariah 32
3.3.2. Pusat Industri Halal Global 32

4. MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 33

4.1. Pembangunan Adil dan Merata 35
4.1.1. Desa Naik Kelas 35
4.1.2. Koperasi (Kemitraan) sebagai Corak Perekonomian Nasional 36
4.1.3. Gandakan dan Garap Pasar Bersih 36
4.1.4. 4T Terintegrasi (Tempat tinggal – Tempat kerja – Trotoar – Transportasi publik) 36
4.1.5. Desa – Kota Tumbuh Bersama 36
4.1.6. Reforma Agraria Tuntas 36
4.1.7. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua 36
4.1.8. Masyarakat Hukum Adat Sejahtera 36
4.1.9. Perbatasan dan 3T Sebagai Koridor Strategis 37
4.1.10. Anak Muda Berusaha 37

4.2. Bahagia dan Sejahtera 37
4.2.1. Rumah Kita – 10 Juta Hunian 37
4.2.2. Buruh Sejahtera 37
4.2.3. Lansia Bahagia 38
4.2.4. Disabilitas Maju dan Produktif 38
4.2.5. Kampung Sehat 38

5. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL 39

5.1. Infrastruktur Digital Hebat dan SDM Digital Andal 41
5.1.1. *Zero Blank Spot* 41
5.1.2. Internet Kuat, Cepat, Murah 42
5.1.3. Program CERAH Digital – Cerdas dan Ahli Digital 42

5.2. Ekosistem Digital Berdaya Saing 42
5.2.1. Data Aman 42
5.2.2. Dukung Rintisan Usaha Digital *(Start Up)* 42
5.2.3. Regulasi Platform Digital yang Berkeadilan 42
5.2.4. Kemandirian Industri Digital 42
5.2.5. Digital Berdaulat 42

6. MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU 43

6.1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan 46
6.1.1. Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca 46
6.1.2. Harmoni Hutan untuk Keseimbangan 46
6.1.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 46
6.1.4. Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim 46
6.1.5. Penerapan ESG 46
6.1.7. KadarKlim – Kampung Sadar Iklim 46

6.2. Ekonomi Hijau 46
6.2.1. Transisi Energi 46
6.2.2. Desa Mandiri Energi 47
6.2.3. Limbah jadi Berkah 47
6.2.4. Ekonomi Sirkuler 47

6.3. Ekonomi Biru 47
6.3.1. Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan 47
6.3.2. Akselerasi 11 Potensi Maritim 47
6.3.3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi 47
6.3.4. Perikanan Budidaya Berkelanjutan 48
6.3.5. Maritim Unggul (MU) 48
6.3.6. Industri Maritim Jaya 48
6.3.7. Wisata Maritim Mendunia 48
6.3.8. Mengatasi Pencemaran Laut 48

7. MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL 49

7.1. Demokrasi Substantif 52
7.1.1. Menjamin Kebebasan Sipil 52
7.1.2. Galang Supremasi Sipil 52
7.1.3. Gerak Pemantapan Lembaga Politik 52
7.1.4. Kemerdekaan Pers dan Media 52

7.2. Pemerintahan yang Bersih dan Tulus Melayani Rakyat 52
7.2.1. Lapor Presiden 52
7.2.2. Mal Pelayanan Publik 52
7.2.3. Nomor Darurat Nasional 52
7.2.4. Digitalisasi Pemerintahan 53
7.2.5. ASN Sejahtera 53

7.3. Hukum Adil untuk Semua 53
7.3.1. Membasmi Korupsi 53
7.3.2. Keadilan Restoratif 53
7.3.3. Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM 53
7.3.4. Pelanggaran HAM Diselesaikan 53
7.3.5. Legislasi Partisipatif 53
7.3.6. Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional 53

7.4. Polisi Profesional Tepercaya 54
7.1.1. Kesesuaian Tindakan Hukum 54
7.1.2. Kepatuhan Terhadap Standar dan HAM 54
7.1.3. Tanggap Terhadap Kebutuhan Warga Biasa 54
7.1.4. Bhayangkara Sejahtera 54

8. MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA 55

8.1. Berperan Sentral dalam Menata Dunia Baru 57
8.1.1. Koeksistensi Geopolitik Progresif 57
8.1.2. Perjanjian Internasional 100% untuk Kepentingan Nasional 57
8.1.3. Kedutaan Besar Ujung Tombak Pelayanan WNI 58

8.2. Kedaulatan NKRI dengan Sistem Pertahanan 5.0 58
8.2.1. Modernisasi Pertahanan SAKTI 58
8.2.2. Prajurit Sejahtera 58
8.2.3. Industri Pertahanan Keamanan Kelas Dunia 58
8.2.4. Benteng Pertahanan Nusantara 58
8.2.5. Perisai Siber Nusantara 58

FONDASI 59
PENUTUP 61

VISI-MISI DAN PROGRAM AKSI
GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD

Pendahuluan

Kami, GANJAR PRANOWO dan MAHFUD MD, telah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Kami sepenuhnya setia pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar dan tujuan bernegara, landasan kebijakan pemerintahan negara, dan menjadi spirit bagi kepemimpinan Indonesia di dalam membangun persaudaraan dunia. Kami berkomitmen untuk mempercepat keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dengan menaruh perhatian terpenting bagi fakir miskin dan anak telantar untuk dipelihara negara. Hal tersebut menjadi pijakan bagi tekad kami di dalam mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen, dan secara bertahap mengurangi kemiskinan hingga 2,5% tahun 2029.

Dedikasi kami ditujukan pada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berkaitan dengan hal itu, kami bertekad untuk memerdekakan rakyat miskin melalui pemenuhan hak pendidikan untuk semua, kesehatan tanpa diskriminasi, sistem jaminan sosial, dan penyediaan kebutuhan pangan, papan, dan pekerjaan yang layak. Memerdekakan rakyat miskin menjadi awal bagi pelaksanaan konsepsi Pembangunan Indonesia Sentris sebagai negara kepulauan-maritim.

Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah diletakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan dengan berbagai capaian tersebut kami bertekad untuk memajukan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Strategi pembangunan nasional yang kami rancang ditujukan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Strategi Berdaulat dalam Politik, kami akan menjalankan pemerintahan yang BERGERAK CEPAT untuk melindungi rakyat dalam kehidupan yang demokratis serta bertekad untuk memajukan hak-hak sosial ekonomi dan budaya rakyat.

Strategi Berdikari dalam Ekonomi, kami akan memastikan roda perekonomian BERGERAK CEPAT, adil, dan merata dengan mengutamakan pembangunan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya guna bagi peningkatan nilai tambah perekonomian nasional.

Strategi Berkepribadian dalam Kebudayaan, kami akan BERGERAK CEPAT memajukan seluruh aspek kehidupan berdasarkan jati diri dan kebudayaan bangsa, dan membangun disiplin nasional disertai cara pikir, cara kerja, cara hidup yang unggul serta semangat gotong royong untuk membawa kemajuan peradaban Indonesia.

PERSOALAN POKOK DAN TANTANGAN KE DEPAN

Tugas membangun bangsa dan negara ke depan membutuhkan gerak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan menjawab berbagai tantangan.

Kami sangat memahami perubahan dan tantangan global seperti geopolitik, geoekonomi, perkembangan kependudukan dunia, disrupsi teknologi dan informasi, perubahan iklim, serta globalisasi, telah memicu kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan miskin. Struktur geopolitik, ketidakadilan sistem internasional, dan pertarungan hegemoni antar negara tersebut mengakibatkan berbagai krisis mulai dari energi, pangan, kemiskinan, ketimpangan, hingga berbagai pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan.

Di tengah berbagai persoalan geopolitik global, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan pokok, di antaranya adalah:

Pertama, kualitas sumber daya manusia Indonesia. Struktur tenaga kerja Indonesia mayoritas atau 56,33% adalah lulusan SMP ke bawah, kemudian 31,34% lulusan SMA, dan hanya 12,32% lulusan perguruan tinggi. Dengan kondisi tersebut, produktivitas tenaga kerja Indonesia menurut ILO hanya memiliki *output* sebesar US$13 per jam atau masih di bawah Singapura US$74, Brunei Darussalam US$56, Malaysia US$26, dan Thailand US$15.

Kedua, kohesivitas sosial menurun. Ketidakadilan dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya serta berbagai konflik agraria menjadi pemicu terbesar menurunnya kohesivitas sosial. Selain itu, masih merebaknya berbagai persoalan sosial seperti intoleransi dan radikalisme, di beberapa tempat telah memicu terorisme. Menurunnya kohesivitas sosial juga disebabkan oleh tekanan modernisasi yang meminggirkan rakyat dari lingkungan sosialnya sehingga

berujung pada terjadinya berbagai konflik sosial.

Ketiga, struktur perekonomian nasional dan lingkungan. Meski persentase penduduk miskin terus berkurang hingga hanya 9,36% dari populasi pada Maret 2023. Namun, jebakan kemiskinan masih akan terus menjerat penduduk bila tidak memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya dengan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Di samping itu, struktur pembangunan nasional relatif masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, sektor, dan kelompok. Krisis iklim juga menjadi persoalan yang dampaknya telah nyata dirasakan dan mengancam keselamatan, kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko bencana alam, serta mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan.

Keempat, sistem politik dan tata pemerintahan negara yang bercorak korporatis dan hanya berbasis elektoral menyebabkan mahalnya biaya demokrasi. Struktur tersebut juga telah menjauhkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dari sirkuit kekuasaan. Sementara itu, ego sektoral masih terus menjadi penghambat pembangunan nasional yang holistik.

Kelima, ketidakadilan hukum. Budaya tertib hukum, kesetaraan dan keadilan di mata hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan ketidakpastian proses hukum, bermuara pada ketidakpastian hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga keadilan dalam hukum belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas.

Ke depan, Indonesia harus mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul, yang di antaranya adalah:

Bonus demografi akan menjadi bencana demografi apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan penguasaan sains dan teknologi. Dengan jumlah penduduk tahun 2022 lebih dari 278 juta jiwa atau terbesar keempat di dunia dapat menjadi potensi sekaligus kekuatan besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dapat menjadi “kutukan sumber daya alam” jika tidak dikelola secara optimal. Potensi sumber daya alam seperti energi, mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, serta keanekaragaman hayati adalah kunci bagi Indonesia dalam bersaing di dunia internasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, distribusi akses dan hasil dari pengelohan sumber daya alam juga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Indonesia tercatat sebagai negara pengguna internet yang besar, mulai dari media sosial, mesin pencari, *e-commerce*, dan produk digital lainnya. Potensi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US$146 miliar tahun 2025 dan US$220 - US$360 miliar tahun 2030 harus dimanfaatkan dengan bersandar pada kekuatan dan sumber daya nasional.

Perubahan iklim yang telah bergeser menjadi krisis iklim mengharuskan adanya pergeseran paradigma dalam pembangunan. Lingkungan hidup atau *planetary boundaries* harus menjadi batasan bagi seluruh aktivitas, utamanya aktivitas ekonomi. Keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan menjadi titik krusial.

Demokrasi yang telah berjalan selama 25 tahun sejak reformasi, bukanlah suatu hal yang datang dengan sendirinya. Atas dasar itu, demokrasi harus terus dikawal dengan menutup pintu pada otoritarianisme. Di saat yang sama, hak asasi, keadilan hukum, dan pemerintah yang efektif harus dikedepankan sebagai esensi demokrasi.

Tatanan global yang terus bergerak menjadi dunia multipolar menuntut adanya peran Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut memiliki konsekuensi pada bangunan pertahanan dan keamanan yang mendukung solidaritas internasional.

Visi

Kami menyadari pentingnya kesinambungan pemerintahan negara Republik Indonesia yang diawali oleh Presiden Soekarno sebagai pembuka gerbang kemerdekaan, Presiden Soeharto dengan gerbang pembangunan, dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara bersama-sama telah membuka gerbang demokrasi, hingga Presiden Joko Widodo yang meletakkan gerbang kemajuan Indonesia Raya. Guna melanjutkan kesinambungan tersebut, maka kami mengusung visi sebagai berikut:

Menuju Indonesia Unggul

Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari



Indonesia Unggul

merupakan kehendak bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat, tidak sekedar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain. Unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap.

Gerak Cepat

merupakan suatu penegasan bahwa berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir. Gerak Cepat dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat melalui perencanaan matang, serta target dan tahapan yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana.

Negara Maritim

merupakan kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan. Laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adil dan Lestari

adalah muara dari langkah yang ditempuh seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, merasakan keadilan sosial terlaksana, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.

MISI

Upaya mencapai visi Mempercepat Indonesia Unggul, ditempuh dengan
8 GERAK CEPAT GANJAR PRANOWO & MAHFUD MD sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian

2. Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi Melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari

3. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah

4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi



5. Mempercepat Pembangunan Sistem Digital Nasional

6. Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru

7. Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan, dan Keamanan yang Profesional

8. Mempercepat Peningkatan Peran Indonesia dalam Mewujudkan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Pertahanan Negara

8 GERAK CEPAT ini merupakan langkah cepat yang terencana dan terukur dengan rincian program aksi sebagai berikut:

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPRIBADIAN



01 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPRIBADIAN



1.1. Kesehatan Jiwa dan Raga

1.1.1. 1 Desa — 1 Puskesmas/Pustu – 1 Dokter/Nakes
Rakyat harus mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Memetakan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (*telemedicine*).

1.1.2. Layanan Konsul Keliling (KOLING)
Tenaga kesehatan berkeliling dari pintu ke pintu rakyat untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan, serta asistensi rujukan.

1.1.3. Ibu Sehat, Anak Sehat
Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui. Program 1.000 hari pertama, serta pasokan gizi untuk anak hingga usia lima tahun. Dengan target prevalensi tengkes (*stunting*) di bawah 9% serta ibu dan ayah menjadi penjaga kesehatan keluarga.

1.1.4. Penguatan Kesehatan Mental
Penyediaan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya dan membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik, dengan membangun pos-pos konseling di semua kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.

1.1.5. Perluasan & Kemudahan Layanan Kesehatan
Menetapkan standar waktu pelayanan pasien BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter, hingga penebusan obat baik di posyandu, puskesmas, juga rumah sakit.

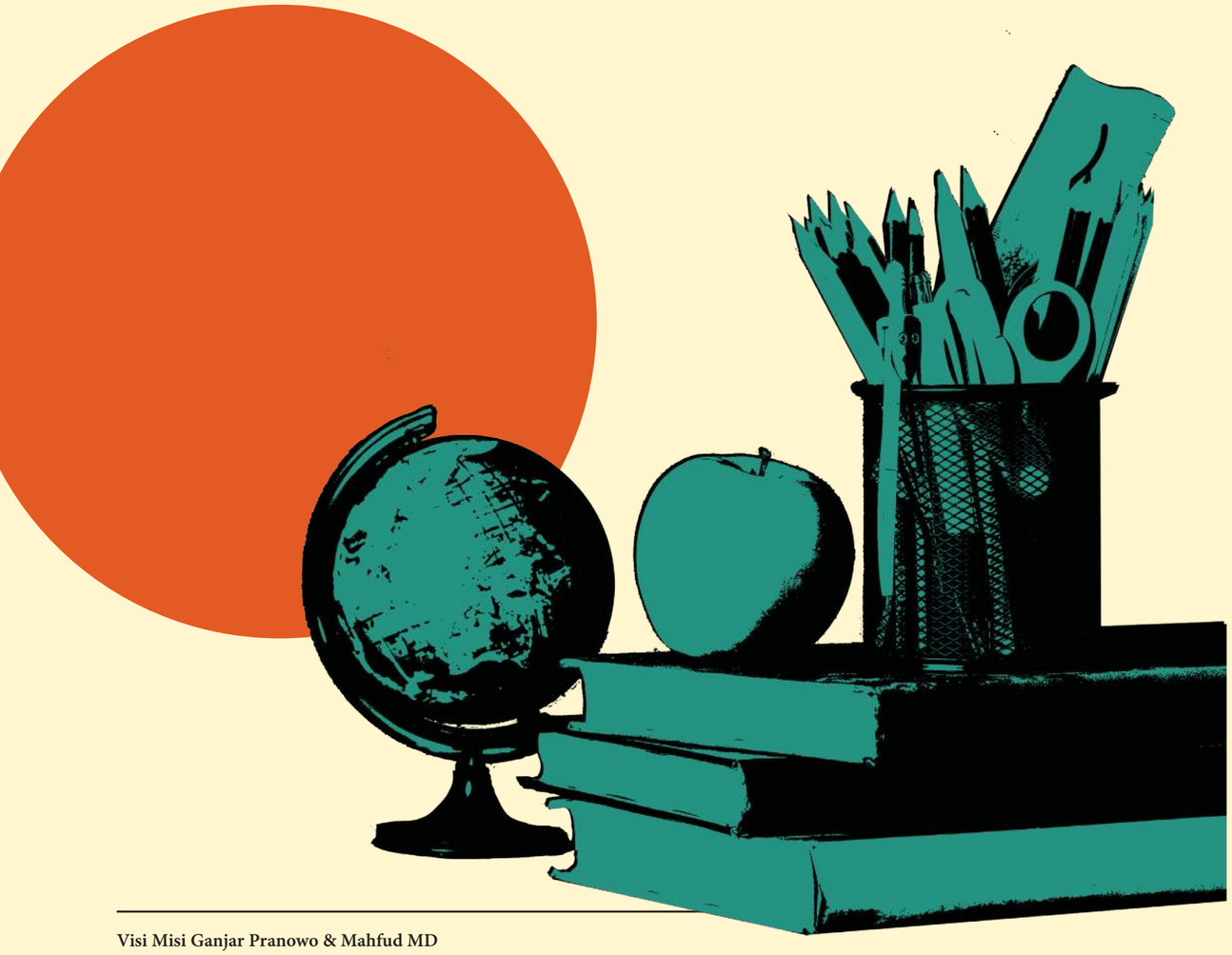
1.2. Pendidikan Berkualitas dan Merata

1.2.1. Wajib Belajar 12 Tahun Gratis: Pintar Tanpa Biaya
Transformasi pendidikan termasuk penggunaan *tele-education* bagi anak Indonesia secara merata, berkualitas, dan produktif, di sekolah negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan bantuan dari pemerintah, termasuk bagi santri dan pesantren.

1.2.2. 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana
Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.

1.2.3. Guru dan Dosen Sejahtera, Berkualitas, dan Kompeten Sejajar Negara Maju
Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.

1.2.4. Integrasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi – Dunia Usaha
Menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi.



1.3. Negara Hadir dan Perlindungan Sosial Adaptif

1.3.1. Tingkat Kemiskinan 2,5% dan Kemiskinan Ekstrem 0%
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, adalah amanat konstitusi. Kami bertekad menjalankan amanat tersebut dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif. Percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN.

1.3.2. PKH 15 Juta Keluarga Penerima Manfaat
PKH akan kami tingkatkan dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima, sebagai komitmen kami untuk terus membantu rakyat.

1.3.3. Cukup Pakai NIK
Cukup menggunakan NIK sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan, dan layanan dari pemerintah.

1.3.4. Penguatan Sistem SATU DATA INDONESIA
Sistem data dan basis data yang aman, valid, dan akurat dengan pengelolaan data yang bisa berbagi pakai dan mendukung pertukaran data untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

1.3.5. Dana Abadi Kesejahteraan Sosial
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus berkelanjutan. Sehingga dana abadi akan menjadi salah satu opsi kami untuk pembiayaan program-program kesejahteraan sosial, termasuk membantu warga difabel.

1.4. Budaya Maju dan Sportif

1.4.1. Berkepribadian Nasional
Kebudayaan yang mengabdi pada rakyat, mengikis feodalisme, dan mengedepankan persatuan nasional dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

1.4.2. Seni Budaya Indonesia Kebanggaan Dunia
Dukungan nyata untuk seluruh karya seni dan warisan budaya Indonesia agar dapat mendunia melalui integrasi data, pemasaran yang tajam, dan membantu jenama (*merk*) lokal bermitra dengan jenama besar dunia.

1.4.3. Seniman Aman Nyaman
Perlindungan hak cipta, termasuk hak cipta komunal, dukungan pembiayaan, dan apresiasi karya lokal tradisional.

1.4.4. Budayawan Berkarya
Memberikan dukungan sumber daya, penghargaan, dan apresiasi nyata kepada budayawan untuk terus berkarya secara kreatif.

1.4.5. Atlet Sejahtera Prestasi Mendunia
Penataan sistem rekrutmen, pembinaan, kompetisi, penghargaan, dan fokus pada kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Kami bertekad untuk mewujudkan olahraga unggulan sebagai lambang supremasi Indonesia seperti bulu tangkis, sepak bola, panjat tebing, dan angkat besi.

1.4.6. 1 Desa - 1 Lapangan
Menumbuhkan budaya sportif dengan revitalisasi infrastruktur olahraga sekurang-kurangnya 1 lapangan olahraga setiap desa yang ditingkatkan fungsinya secara bertahap hingga menjadi gelanggang olahraga.

1.5. Perempuan Maju dan Anak Sejahtera

1.5.1. Kartini Maju
Dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang. Disertai memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100%. Jaminan kesetaraan kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjalankan peran pengasuhan dalam keluarga.

1.5.2. Jaga Teman
Memberikan pemahaman pentingnya berpihak pada korban serta dukungan anggaran yang nyata kepada satgas anti kekerasan berbasis gender dan perundungan di seluruh lembaga.

1.5.3. Memperbanyak Tempat Penitipan Anak
Memperbanyak tempat penitipan anak yang berkualitas, baik di sektor formal maupun di sektor informal, sehingga orang tua tidak perlu khawatir.



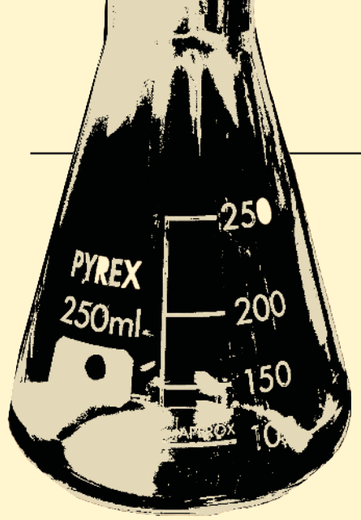
MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI



MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI

02





2.1. Riset dan Inovasi Sebagai Fondasi

2.1.1. Lipat Gandakan Anggaran Riset dan Inovasi
Meningkatkan investasi riset dan inovasi industri unggulan melalui peningkatan anggaran riset dan inovasi (*Gross Domestic Expenditure on Research and Development*) mencapai 1% dari PDB pada tahun 2029 dengan mendorong sinergi pendanaan pemerintah dan swasta melalui efisiensi pagu anggaran dan penyederhanaan regulasi pendanaan filantropi maupun insentif pajak atau subsidi bagi swasta.

2.1.2. Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi
Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam negeri untuk penyusunan kebijakan dan industrialisasi.

2.2. Lompatan Menjemput Kemajuan

2.2.1. GP Project
Karantina produktif dengan mengumpulkan ilmuwan dan teknisi untuk menghasilkan dan menguasai teknologi yang bermanfaat bagi orang banyak. Mulai dari teknologi sederhana yang murah, hingga teknologi tinggi yang mampu menjadi *game changer* bagi Indonesia ke depan.

2.2.2. Beasiswa yang Masif dan Terarah
Beasiswa akan kami tingkatkan dan perluas, bagi anak-anak muda Indonesia yang siap menjawab tantangan Indonesia ke depan sejalan dengan strategi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH

03



3.1. Ekonomi Unggul Berdaya Saing

3.1.1. Cepat Kerja — 17 Juta Lapangan Kerja Baru
Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja.

3.1.2. Mudah Berusaha
Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar.

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Mencapai 7%
Strategi untuk keluar dari *middle income trap* secara inklusif, dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8%. Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi.

3.1.4. Percepatan Penyelesaian IKN
Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik.

3.1.5. *Made in* Indonesia
Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional, serta menempatkan Indonesia pada posisi daya saing strategis di pasar global.

3.1.6. Industrialisasi 5.0: Karena Semua Ada di Kita
Industrialisasi yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas. Indonesia memiliki rantai pasok yang lengkap, dari mulai bahan mentah, tenaga kerja terampil dan pasar yang besar. Hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN. Hilirisasi difokuskan pada SDA dan mineral di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya.

3.1.7. Ekonomi Kreatif Makin Melaju
Menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur *creative hub* di setiap daerah.

3.1.8. Indonesia Tujuan Utama Pariwisata Dunia
Pembangunan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan. Melipatgandakan destinasi pariwisata super prioritas dan memperluas promosi destinasi wisata khas Indonesia untuk mencapai target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 30 juta pada tahun 2029.

3.1.9. Fiskal Tangguh
Anggaran negara yang memadai, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan optimalisasi sumber pendapatan, reformasi kelembagaan, dan efektivitas belanja negara.

3.1.10. Infrastruktur dan Simpul Konektivitas Indonesia
Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain.

3.1.11. Logistik Murah
Mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, mengharmonisasikan pelaksanaan sistem logistik nasional hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi *Sea Lines of Communication* (SLoc) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur perdagangan internasional.

3.1.12. BUMN Unggul
Mendorong lebih banyak BUMN unggulan untuk bersaing di pasar global dan regional.

3.2. Kedaulatan Pangan

3.2.1. Pangan Terjamin, Terjaga, Terjangkau, dan Terdiversifikasi
Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan.

3.2.2. Alsintan Modern dan Dukungan Sarana Prasarana
Mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu. Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas *cold storage,* serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.

3.2.3. Industri Pangan Berkelanjutan
Membangun industri pangan berdaya saing dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan.

3.2.4. Lahan Subur untuk Petani
Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

3.2.5. Petani, Peternak, dan Nelayan Sejahtera
Meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak, disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri.

3.3. Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal

3.3.1. Pusat Industri Keuangan Syariah
Mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.

3.3.2. Pusat Industri Halal Global
Optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional sekaligus mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri halal.

MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI



MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 04



4.1. Pembangunan Adil dan Merata

4.1.1. Desa Naik Kelas
Melipatgandakan dana desa berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul.

4.1.2. Koperasi (Kemitraan) sebagai Corak Perekonomian Nasional
Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM serta kapasitas UMKM melalui digitalisasi, termasuk akses pembiayaan dan pemasaran.

4.1.3. Gandakan dan Garap Pasar Bersih
Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.

4.1.4. 4T Terintegrasi (Tempat tinggal – Tempat kerja – Trotoar – Transportasi publik)
Menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.

4.1.5. Desa – Kota Tumbuh Bersama
Menjadikan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama. Desa menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan serta penopang kebutuhan perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan.

4.1.6. Reforma Agraria Tuntas
Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.

4.1.7. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua
Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.

4.1.8. Masyarakat Hukum Adat Sejahtera
Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.

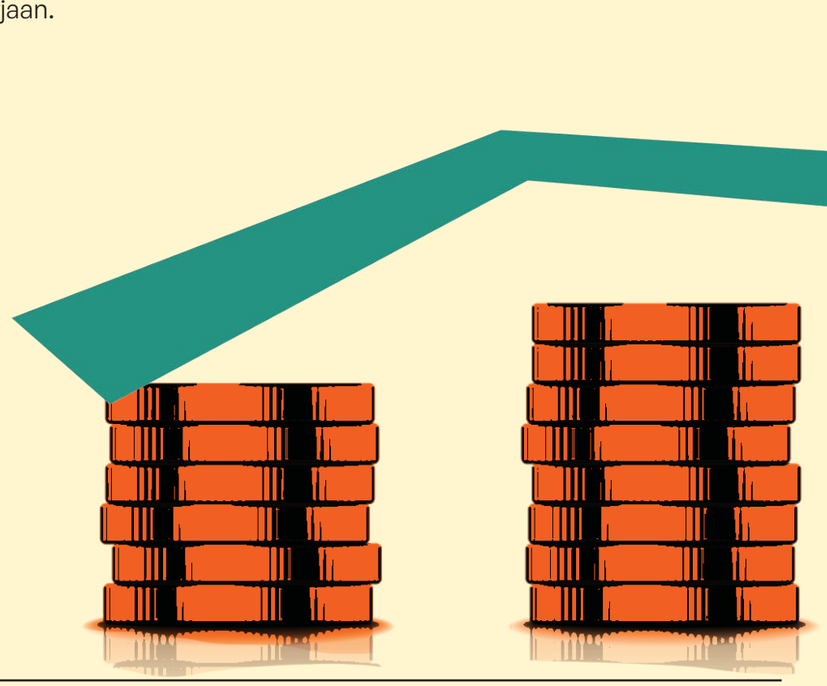
4.1.9 Perbatasan dan 3T Sebagai Koridor Strategis
Memperkuat SDM, program afirmasi, akselerasi infrastruktur, energi, pangan, air bersih, serta menjadikan wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terpencil, terluar) sebagai koridor strategis pembangunan nasional.

4.1.10. Anak Muda Berusaha
Seluruh kelompok anak muda mendapatkan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan kemudahan memulai dan mengembangkan usaha.

4.2. Bahagia dan Sejahtera

4.2.1. Rumah Kita — 10 Juta Hunian
Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.

4.2.2. Buruh Sejahtera
Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.



4.2.3. Lansia Bahagia
Membentuk program kesejahteraan *(workfare)* opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja dan program tunjangan yang memadai bagi terjaminnya kehidupan lansia.

4.2.4. Disabilitas Maju dan Produktif
Kesetaraan akses pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, serta memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas.

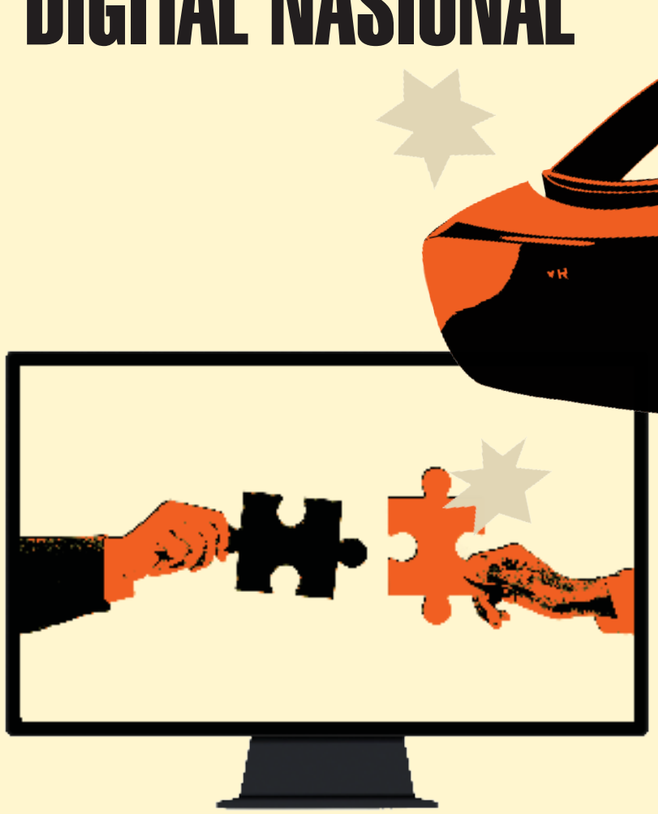
4.2.5. Kampung Sehat
Memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota, dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL 05



5.1. Infrastruktur Digital Hebat dan SDM Digital Andal

5.1.1. ***Zero Blank Spot***
Semua bisa terhubung internet untuk memastikan akses digital bagi seluruh rakyat di setiap pelosok tanah air.

5.1.2. **Internet Kuat, Cepat, Murah**
Koneksi internet kuat, cepat, dan murah akan mendorong aktivitas digital berkembang, produktif, dan memiliki daya saing di tingkat internasional.

5.1.3. **Program CERAH Digital – Cerdas dan Ahli Digital**
Program pendidikan dan beasiswa yang mendukung peningkatan SDM digital yang berdaya saing dan peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan seluruh rakyat.

5.2. Ekosistem Digital Berdaya Saing

5.2.1. **Data Aman**
Memastikan negara hadir di ruang digital melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga pengawasan independen.

5.2.2. **Dukung Rintisan Usaha Digital (*Start Up*)**
Mewujudkan Indonesia yang subur digital melalui dukungan nyata terhadap rintisan usaha digital, seperti kemudahan pembiayaan, insentif pajak, dan inkubasi bisnis.

5.2.3. **Regulasi Platform Digital yang Berkeadilan**
Meregulasi platform digital, baik nasional maupun multinasional, untuk kepentingan nasional yang dilandasi kepribadian bangsa.

5.2.4. **Kemandirian Industri Digital**
Meningkatkan porsi industri digital domestik dalam proses digitalisasi, termasuk penciptaan aplikasi nasional. Meningkatkan peran pelaku usaha dan produk domestik dalam aktivitas ekonomi digital termasuk *e-commerce* untuk mendukung perkembangan UMKM lokal.

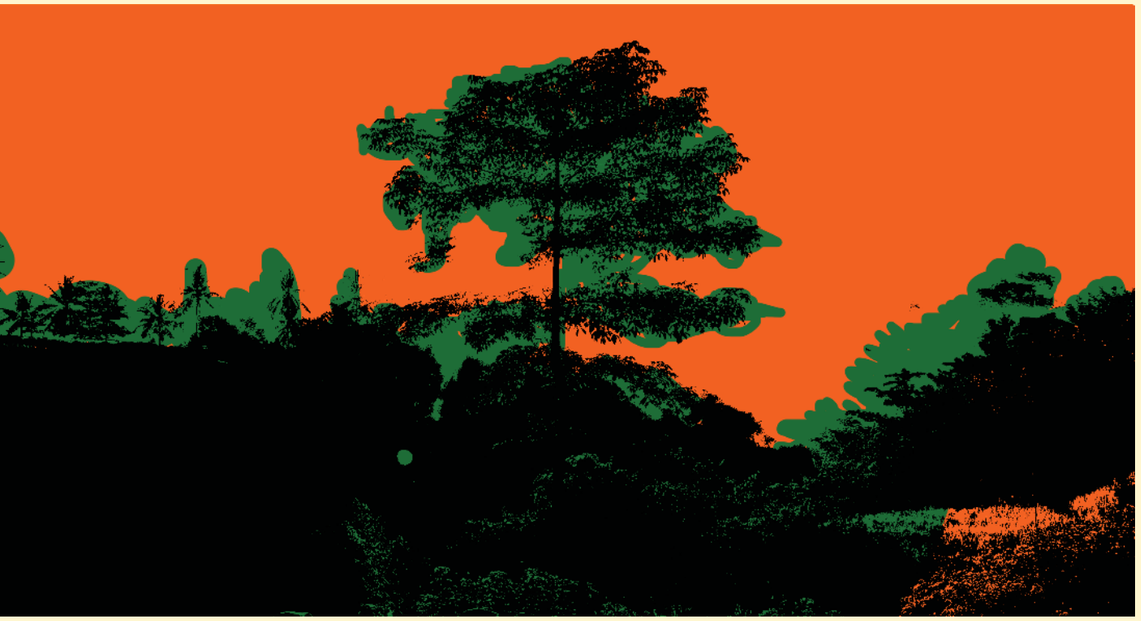
5.2.5. **Digital Berdaulat**
Memastikan kedaulatan digital dengan mengedepankan perlindungan setiap warga negara di ruang digital, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap ancaman seperti judi *online* dan penyebaran misinformasi.

MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU



MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU

06



6.1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan

6.1.1. Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju *net zero emission*.

6.1.2. Harmoni Hutan untuk Keseimbangan
Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

6.1.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan.

6.1.4. Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim
Penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana, serta transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan diikuti penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan.

6.1.5. Penerapan ESG
Pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial dan tatakelola (*Environmental, Social, Governance/*ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.

6.1.6. KadarKlim – Kampung Sadar Iklim
Program promotif di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

6.2. Ekonomi Hijau

6.2.1 Transisi Energi
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri, sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.

6.2.2. Desa Mandiri Energi
Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya, sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.

6.2.3. Limbah jadi Berkah
Pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan agar berkah ekologi dapat terwujud. Mengubah sampah menjadi peluang tambahan penghasilan alternatif bagi rakyat alias berkah ekonomi (*waste to cash*).

6.2.4. Ekonomi Sirkuler
Meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan dengan ganyang plastik dan gebrak polusi melalui pendekatan *reduce, reuse, recycle, repair and refabricate* (5Rs).

6.3. Ekonomi Biru

6.3.1. Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan
Mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi US$1,4 triliun per tahun secara inklusif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut. Dilakukan demi menjaga gelombang potensi ekonomi biru Indonesia.

6.3.2. Akselerasi 11 Potensi Maritim
(1) Perikanan Tangkap, (2) Perikanan Budidaya, (3) Industri Pengolahan Hasil Perikanan, (4) Industri Bioteknologi Kelautan, (5) Pertambangan dan Energi (ESDM), (6) Pariwisata Bahari, (7) Hutan Bakau, (8) Perhubungan Laut, (9) Sumber Daya Wilayah Pulau-Pulau Kecil, (10) Industri dan Jasa Maritim, dan (11) SDA Nonkonvensional.

6.3.3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi
Penangkapan ikan terkendali untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meratakan distribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Penangkapan ikan terukur dibagi dalam beberapa zonasi di mana seluruh kegiatan penangkapan ikan di laut melalui satelit didukung penggunaan aplikasi digital.

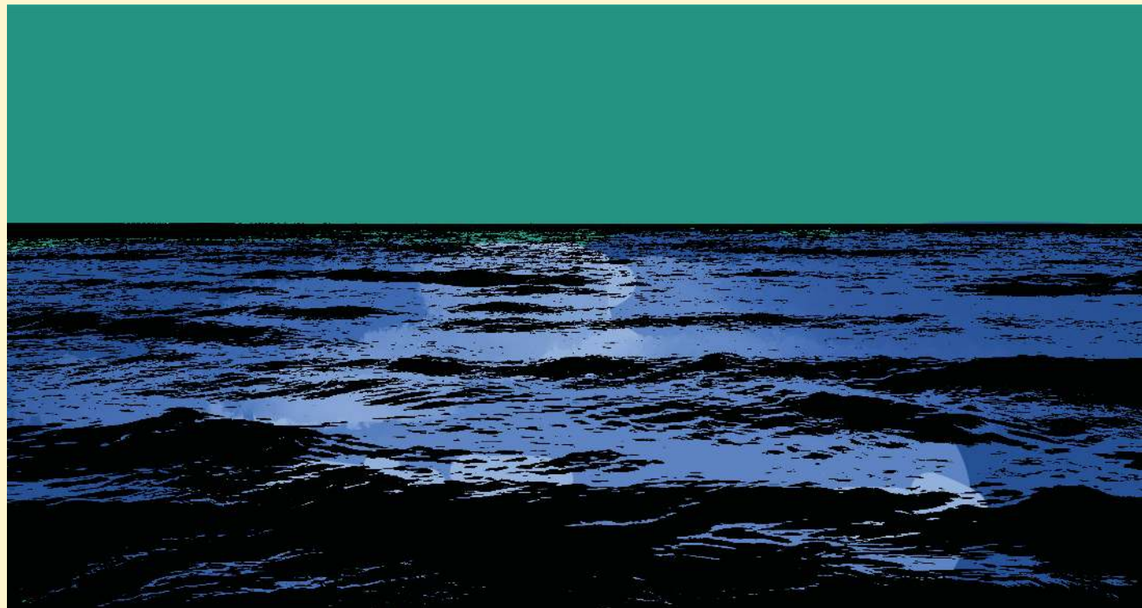
6.3.4. Perikanan Budidaya Berkelanjutan
Meningkatkan produktivitas budidaya melalui penetapan dan penataan kawasan budidaya, bahan pakan lokal berkualitas dan peningkatan nilai tambah produk dan pasar dengan berfokus pada 5 produk budidaya unggulan yaitu: udang, kepiting, lobster, tilapia, dan rumput laut.

6.3.5. Maritim Unggul (MU)
Penguatan kapasitas konektivitas maritim melalui peningkatan kualitas SDM maritim, sarana dan prasarana transportasi laut, pengoptimalan pemanfaatan alur laut dan titik sempit (*choke points*), dengan didukung oleh sistem manajemen transportasi laut yang terintegrasi dengan jalur perdagangan regional dan internasional.

6.3.6. Industri Maritim Jaya
Penguatan industri galangan, industri perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangan ekonomi maritim terhadap PDB. Industrialisasi kelautan dilakukan demi gemilangkan pesisir yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

6.3.7. Wisata Maritim Mendunia
Pengembangan kawasan wisata bahari, Kawasan Ekonomi Khusus wisata bahari, serta meningkatkan daya tarik investasi wisata maritim.

6.3.8. Mengatasi Pencemaran Laut
Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi pencemaran laut termasuk pencemaran yang bersifat lintas batas negara.



MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL



07 MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL



7.1. Demokrasi Substantif

7.1.1. Menjamin Kebebasan Sipil
Menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab.

7.1.2. Galang Supremasi Sipil
Memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.

7.1.3. Gerak Pemantapan Lembaga Politik
Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.

7.1.4. Kemerdekaan Pers dan Media
Menjamin pers yang BERGEMA (Bebas, Bergerak, dan Bermartabat) dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Meningkatkan literasi media sosial serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab.

7.2. Pemerintahan yang Bersih dan Tulus Melayani Rakyat

7.2.1 Lapor Presiden
Penyediaan akses penyampaian informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya (bebas kuota dan bebas pulsa) dan menjamin keamanan pelapor.

7.2.2 Mal Pelayanan Publik
Memperluas pelayanan dan ketersediaan mal pelayanan, baik fisik dan digital, di seluruh wilayah yang disertai dengan nomor yang bisa dilacak progres penyelesaiannya (seperti nomor resi).

7.2.3 Nomor Darurat Nasional
Pengintegrasian nomor darurat nasional untuk layanan *emergency*, seperti kesehatan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan kelistrikan.

7.2.4. Digitalisasi Pemerintahan
Memastikan pelayanan pemerintahan *sat-set* dengan digitalisasi seluruh aspek pemerintahan.

7.2.5. ASN Sejahtera
Menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN.

7.3. Hukum Adil untuk Semua

7.3.1. Membasmi Korupsi
Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.

7.3.2. Keadilan Restoratif
Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.

7.3.3. Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM
Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

7.3.4. Pelanggaran HAM Diselesaikan
Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.

7.3.5. Legislasi Partisipatif
Gencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.

7.3.6. Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional
Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan.

7.4. Polisi Profesional Tepercaya

7.4.1. Kesesuaian Tindakan Hukum
POLRI harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis.

7.4.2. Kepatuhan Terhadap Standar dan HAM
Senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakkan HAM.

7.4.3. Tanggap Terhadap Kebutuhan Warga Biasa
Melakukan tugas kamtibmas, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan.

7.4.4. Bhayangkara Sejahtera
Meningkatkan kesejahteraan bhayangkara sejalan dengan tugas, tanggung jawab dan capaian. Fasilitasi layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan.



MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA



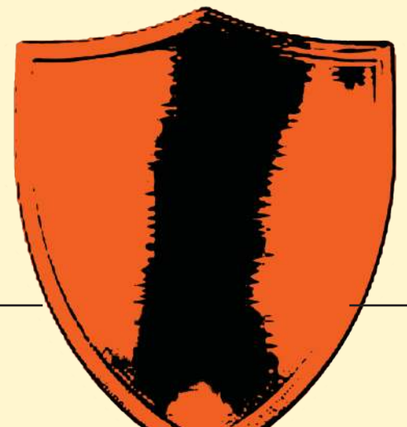
08 MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA



8.1. Berperan Sentral dalam Menata Dunia Baru

8.1.1. Koeksistensi Geopolitik Progresif
Menjalankan politik bebas aktif dengan prinsip Dasasila Bandung untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Memperkuat pelibatan global Indonesia yang otonom dalam forum bilateral dan multilateral dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Memperkuat komitmen untuk mendukung perjuangan pergerakan rakyat Palestina.

8.1.2. Perjanjian Internasional 100% untuk Kepentingan Nasional
Memastikan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat harus mengutamakan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mengedepankan isu-isu strategis dan kekinian, serta memastikan perlindungan segenap rakyat Indonesia.



8.1.3. Kedutaan Besar Ujung Tombak Pelayanan WNI
Memperkuat diplomasi dan kedutaan besar sebagai ujung tombak ekspor, perlindungan PMI, dan pelayanan WNI di luar negeri yang responsif.

8.2. Kedaulatan NKRI dengan Sistem Pertahanan 5.0

8.2.1 Modernisasi Pertahanan SAKTI
Transformasi pertahanan berdasarkan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANRATA) untuk membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia yang berdaya gentar dan dilengkapi dengan alutsista SAKTI (Perkasa dengan Keunggulan Teknologi 5.0), serta memperkuat kemampuan untuk melindungi tanah air NKRI dengan modernisasi alutsista dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi ancaman dan tantangan.

8.2.2 Prajurit Sejahtera
Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit dan keluarga yang ditopang dengan rawatan dan layanan kedinasan yang berkualitas di seluruh penjuru Nusantara.

8.2.3 Industri Pertahanan Keamanan Kelas Dunia
Mendorong kemandirian sebagai bagian dari rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat proses alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.

8.2.4 Benteng Pertahanan Nusantara
Mengembangkan kemampuan proyeksi strategis dengan mengembangkan strategi anti akses dan penangkalan wilayah untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan pelaksanaan hak berdaulat di ZEE, terutama di koridor navigasi maritim dan landas kontinen, ruang dirgantara dan antariksa Indonesia.

8.2.5 Perisai Siber Nusantara
Meningkatkan kemampuan siber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan siber serta mendorong pembentukan Angkatan Siber TNI.

FONDASI

Kami sangat menyadari bahwa pelaksanaan Misi 8 Gerak Cepat untuk mewujudkan Visi Menuju Indonesia Unggul, memerlukan **3 Fondasi** yang kuat untuk menopang seluruh program aksi. Fondasi tersebut akan menjadi prasyarat tercapainya tujuan mulia dalam mempercepat terwujudnya negara maritim yang adil dan lestari.

Ketiga fondasi yang dimaksud yakni **(i) ketersediaan anggaran** yang memadai dengan kualitas belanja yang baik, **(ii) pemberantasan korupsi** yang tegas untuk pemerintah yang bersih dan dipercaya rakyat, serta **(iii) digitalisasi birokrasi** yang mempercepat dan mempermudah layanan publik.

Anggaran yang meningkat, jelas, rinci, dan dikelola dengan baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga seluruh agenda dan program pembangunan yang sangat dibutuhkan rakyat, dapat terlaksana dengan dukungan anggaran yang kuat. Namun, tentu saja bukan hanya jumlah anggaran yang menjadi penentu, melainkan juga bagaimana dana tersebut dikelola dan dipergunakan.

Bebas dari korupsi merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang bersih. Korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir era digital yang terus bergerak saat ini telah memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, murah, dan transparan kepada masyarakat. Dengan digitalisasi, birokrasi dapat dipangkas dan layanan pemerintah menjadi lebih efisien. Penerapan sistem digital dalam pelayanan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan.

PENUTUP

GERAK CEPAT
GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD

GERAK CEPAT harus dilakukan agar bonus demografi yang akan segera berakhir, dapat kita peroleh untuk Menuju Indonesia Unggul. Dengan semangat kerja keras dan gotong royong oleh seluruh anak bangsa, kami yakin apa yang menjadi tujuan bersama ini akan dapat kita raih. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi GERAK CEPAT kita bersama.

Calon Presiden
2024 – 2029

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.

Calon Wakil Presiden
2024 – 2029

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

GERAK CEPAT
INDONESIA UNGGUL

GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
INDONESIA 2024